

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

## PT Bank Perekonomian Rakyat Mindosari

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1040182-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-601939-28042026172840

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

mindosari@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-28 17:28:40



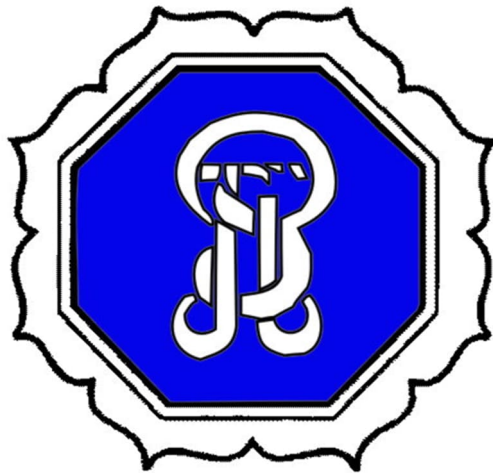
Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
MINDOSARI

---

LAPORAN KEBERLANJUTAN  
*(SUSTAINABILITY REPORT)*

TAHUN 2025



JLN.SANTOSO NO 143 A  
KEC. KEPAHANG – KAB. KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU  
Telp. (0732) 392400

# Daftar Isi

A. PENJELASAN UMUM DAN PENJELASAN STRATEGI KEBERLANJUTAN.....	1
B. IKHTISAR ASPEK KEBERLANJUTAN DAN KINERJA KEBERLANJUTAN.....	5
1. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Ekonomi.....	5
2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Lingkungan Hidup.....	7
3. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan Kinerja Sosial dan Keuangan Inklusi.....	9
4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan, Inovasi dan Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan.....	11
C. PROFIL SINGKAT BPR.....	12
D. PENJELASAN DIREKSI.....	14
E. TATA KELOLA KEBERLANJUTAN.....	22
F. VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN.....	27
G. LEMBAR UMPAN BALIK (FEEDBACK) UNTUK PEMBACA.....	27
H. TANGGAPAN LJK, EMITEN, ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA.....	27

### A. PENJELASAN UMUM DAN PENJELASAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

#### 1. Penjelasan Umum

##### a) Tentang Laporan Keberlanjutan

Sesuai POJK No. 51 /POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan pasal 10 secara substantif mewajibkan BPR/BPRS untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya. Untuk itu BPR/BPRS wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) atau SR (*Sustainability Report*) Tahun 2025 ke OJK paling lambat tanggal 30 April 2026 bersamaan dengan Laporan Tahunan BPR Tahun 2025.

Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Mengacu pada Lampiran 2 POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan bahwa format penulisan Laporan Keberlanjutan sebagai berikut:

1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan
2. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup)
3. Profil Singkat BPR/BPRS
4. Penjelasan Direksi
5. Tata kelola keberlanjutan
6. Kinerja keberlanjutan
7. Verifikasi tertulis dari pihak independen
8. Lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca dan
9. Tanggapan BPR terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.

##### b. Acuan dan Standar Penyusunan Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan PT. BPR Mindosari Tahun 2025 disusun dengan mengkomodir standar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Laporan Keberlanjutan ini tidak lepas dari laporan tahunan yang telah disusun dengan laporan keuangan teraudit untuk tahun buku 2025. PT. BPR Mindosari membuat dan melaporkan kinerja keberlanjutan dalam periode 1 (satu) tahun buku (tahunan). Informasi yang disajikan dalam Laporan Keberlanjutan PT. BPR Mindosari tahun 2025 ini memuat data dan informasi dalam 1 (satu) tahun yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Prinsip penetapan konten dalam Laporan ini didasarkan pada POJK 51/POJK.03/2017 dan disusun berdasarkan 2 prinsip, yaitu prinsip isi dan kualitas.

### Prinsip isi meliputi:

1. Konteks berkelanjutan: Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) ini disusun sejalan dengan konteks keuangan berkelanjutan.
2. Kelengkapan: Informasi disajikan sebagai informasi kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan kelengkapan bagi pembaca.

Prinsip kualitas adalah:

1. Keseimbangan: Informasi terkait capaian dan prestasi, serta tantangan disampaikan sesuai dengan kondisi Bank.
2. Komparabilitas: Data yang disampaikan dalam laporan disajikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Akurasi: Angka dan informasi telah diperiksa secara internal Bank sehingga diyakini akurasinya.
4. Ketepatan waktu: Laporan ini disajikan tepat waktu bersama dengan Laporan Tahunan.
5. Kejelasan: Informasi yang disajikan dalam laporan mudah untuk dipahami.

Topik material dalam Laporan ini adalah topik-topik yang telah diprioritaskan oleh organisasi untuk dicantumkan dalam laporan. Dimensi yang digunakan untuk menentukan prioritas, antara lain, adalah dampak bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak dalam Laporan ini termasuk di dalamnya yang bernilai positif. Penetapan aspek material dan batasan didasarkan pada isu-isu yang berpengaruh signifikan bagi PT. BPR MINDOSARI serta seluruh pemangku kepentingan.

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, BPR mengacu pada 8 (delapan) prinsip keuangan berkelanjutan, dan 3 (tiga) prioritas sesuai POJK No. 51/2017. Delapan prinsip keuangan berkelanjutan yang dikembangkan oleh PT. BPR MINDOSARI adalah:

1. **Investasi yang bertanggung jawab;** adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam keputusan investasi yang bertujuan agar dapat mengelola risiko secara lebih baik. Kami menerapkan prinsip ini melalui pemberian kredit yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dengan menganalisis potensi risiko yang ditimbulkan dari usaha yang dibiaya oleh Bank.
2. **Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan;** Kami menerapkan prinsip ini dengan menuangkannya pada kebijakan keberlanjutan yang dituangkan dalam dokumen RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) yang menjadi landasan PT. BPR MINDOSARI dalam menjalankan bisnis berkelanjutan di kegiatan usaha Bank.

3. Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup; Kami telah memiliki prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dalam mengukur risiko yang dikelola dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) Bank. Selain risiko-risiko finansial, kami juga melakukan proses manajemen risiko khususnya mengukur risiko pemberian kredit atau pinjaman yang bersentuhan langsung dengan aspek sosial dan lingkungan hidup, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
4. Prinsip Tata Kelola; Kami menerapkan tata kelola keberlanjutan (ekonomi, lingkungan dan sosial) yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip penerapan GCG (*Good Corporate Governance*), yaitu transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan kewajaran.
5. **Prinsip Komunikasi yang Informatif**; Kami menyediakan laporan yang informatif mencakup strategi, tata kelola, kinerja dan prospek Bank yang dapat dengan mudah diakses oleh para *stakeholder* melalui situs web PT. BPR MINDOSARI <HTTPS://bankmindosari.co.id>
6. Prinsip Inklusif; Bank menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/ atau jasa yang dapat dengan mudah diakses oleh nasabah. Bank memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang mudah dan merata terhadap layanan yang keuangan PT. BPR MINDOSARI.
7. Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas; Dalam menyusun program keberlanjutan, kami mempertimbangkan sektor-sektor unggulan prioritas yang telah kami tetapkan dalam RAKB (Rencana Aksi Keuangan Bank). Hal ini kami lakukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan mendukung program pemerintah dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.
8. Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi; Kami membuka diri untuk berkomunikasi dan berkerja sama dengan lembaga atau pemerintahan setempat terkait Bisnis Berkelanjutan dalam rangka penyelarasan strategi keberlanjutan Bank. Hal ini terlihat dari keanggotaan perusahaan pada perbarindo dan partisipasi dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang memberdayakan masyarakat.

Sedangkan tiga prioritas RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) adalah:

1. Pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, antara lain mengidentifikasi dan memonitor portofolio pembiayaan Bank yang menunjang keuangan berkelanjutan.
2. Pengembangan kapasitas internal Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan meningkatkan *awareness* mengenai keuangan berkelanjutan (untuk pegawai dan nasabah), implementasi keuangan berkelanjutan pada sektor-sektor usaha yang menjadi fokus Bank.
3. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional, antara lain menyiapkan kebijakan Keuangan Berkelanjutan,

penyesuaian kebijakan internal Bank lainnya seperti Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian, Kebijakan tata kelola keberlanjutan.

Strategi keberlanjutan BPR dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan, menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), dan menyusun Laporan Keberlanjutan.

Prinsip Keuangan Berkelanjutan meliputi :

1. Prinsip keuangan berkelanjutan
2. Tata kelola yang baik
3. Pengelolaan risiko sosial dan lingkungan
4. Pemberian akses keuangan yang inklusif
5. Investasi yang bertanggung jawab
6. Komunikasi yang informatif
7. Pengembangan sektor unggulan prioritas

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan meliputi :

1. Mencakup sasaran, strategi, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan keberlanjutan
2. Mencakup pengelolaan risiko sosial dan lingkungan

## 2. Penjelasan Strategi Keberlanjutan

Strategi keuangan berkelanjutan disusun berdasarkan pertimbangan visi dan misi Bank dalam implementasi keuangan berkelanjutan. Bagi Bank, penerapan keuangan berkelanjutan bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, namun juga sebagai strategi untuk mewujudkan visi Bank khususnya dalam penerapan prinsip inklusi keuangan.

Segmen UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang menjadi sasaran utama Bank dalam pelayanan jasa keuangan diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi. Selain itu, melalui pengembangan produk dan/ atau jasa keuangan berwawasan lingkungan, Bank berupaya meningkatkan peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs - *Sustainable Development Goals*). Hal ini diwujudkan dalam berbagai upaya, di antaranya dengan menyusun rencana kerja, dan mengembangkan RAKB sesuai dengan ketentuan regulator.

Sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab dan Lingkungan Perseroan Terbatas, PT. BPR Mindosari mulai menerapkan prinsip-prinsip *go green company* sejak penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan menjalankan kegiatan-kegiatan diantaranya :

1. Menerapkan efisiensi penggunaan air di setiap toilet yang berada di lingkungan kantor BPR .
2. Mengampanyekan lingkungan kerja menjadi lebih sehat .
3. Menjalankan program "Hemat Energi" dengan pembatasan penggunaan AC dan listrik setelah jam kerja dan mematikan lampu di ruangan yang tidak digunakan.

B. IKHTISAR ASPEK KEBERLANJUTAN DAN KINERJA KEBERLANJUTAN

1. Ikhtisar Aspek keberlanjutan dan Kinerja Ekonomi

Perbandingan Target dan Kinerja Keuangan, Portofolio, Pendapatan dan Laba Rugi

Keterangan	2025	2024	2023
Kinerja Keuangan (Dalam Satuan Rupiah P			
Total Aset	74.910.496.172	64.552.931.255	56.141.013.883
Aset Produktif	73.322.695.185	59.050.853.904	55.054.579.362
Kredit/Pembiayaan Bank	65.552.874.111	54.877.270.130	47.799.971.360
Dana Pihak Ketiga	50.507.459.581	46.011.987.007	38.754.259.280
Pendapatan Operasional	27.825.065.570	21.414.146.384	17.745.067.550
Beban Operasional	15.321.182.812	12.831.095.012	10.594.147.211
Laba Bersih	9.957.291.807	6.902.019.666	5.780.263.572
Rasio Kinerja (Dalam %)			
Rasio Kecukupan Modal Minimum (KMMM)	38,7	25,91	29,26
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	97,88	98,55	98,06
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	4,51	3,61	2,95
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap aset produktif	100	100	100
NPL/NPF Gross	5,04	4,18	3,4
NPL/NPF Nett	3,77	2,48	1,92
Return on Asset (ROA)	17,75	13,74	13,85
Return on Equity (ROE)	92,13	74,51	61,19
Net Interest Margin (NIM)	28,66	23,76	25,45
Rasio Efisiensi (BOPO)	55,06	59,92	59,7
Loan to Deposit Ratio (LDR)	129,79	116,91	123,34

Kinerja Aspek Ekonomi terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Jumlah Jenis produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan				
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan	-	-	-	-
a.1. DPK	-	-	-	-
a.2. Surat Berharga	-	-	-	-
a.3. Lainnya	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan	-	-	-	-
b.1. Kredit / Pembiayaan	-	-	-	-
b.2. Surat Berharga	-	-	-	-
b.3. Lainnya	-	-	-	-
Outstanding produk dan/atau jasa yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan (Dalam Satuan Rupiah Penuh)				
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan	52.626.970.456	50.507.459.581	46.011.987.007	38.754.259.280
a.1. DPK	52.626.970.456	50.507.459.581	46.011.987.007	38.754.259.280
a.2. Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-
a.3. Lainnya	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan	54.720.062.564	65.552.874.111	54.877.270.130	47.799.971.360
b.1. Kredit / Pembiayaan	54.720.062.564	65.552.874.111	54.877.270.130	47.799.971.360
b.2. Surat Berharga yang dimiliki	-	-	-	-
b.3. Lainnya	-	-	-	-
Total Outstanding DPK (Rp)	52.626.970.456	50.507.459.581	46.011.987.007	38.754.259.280
Total Nominal Surat Berharga yang diterbitkan (Rp)	-	-	-	-
Total Outstanding Kredit Kepada Pihak Ketiga (Rp)	54.720.062.564	65.552.874.111	54.877.270.130	47.799.971.360
Total Nominal Surat Berharga yang dimiliki (Rp)	-	-	-	-

Persentase Total Portofolio Kegiatan usaha Berkelanjutan terhadap Total portofolio (%)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan				
a.1. DPK	100%	100%	100%	100%
a.2. Surat Berharga	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan (Kredit)				
b.1. Kredit / Pembiayaan	100%	100%	100%	100%
b.2. Surat Berharga	-	-	-	-

Total Outstanding kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Energi Terbarukan	-	-	-	-
b. Efisiensi Energi	-	-	-	-
c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi	-	-	-	-
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	-	-	-	-
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-	-	-
f. Transportasi Ramah Lingkungan	-	-	-	-
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	-	-	-	-
h. Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-	-
i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Ecoefficient)	-	-	-	-
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	-	-	-	-
k. Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	-	-	-	-
l. Kegiatan UMKM	54.720.062.564	65.552.874.111	54.877.270.130	47.799.971.360
Total outstanding kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (total a - l)	54.720.062.564	65.552.874.111	54.877.270.130	47.799.971.360

2. **Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja** Lingkungan Hidup

PT. BPR Mindosari dalam operasionalnya senantiasa berusaha untuk mewujudkan operasional yang ramah lingkungan dengan tidak membawa dampak buruk bagi lingkungan sekitar.

No.	KUB	Jenis Kegiatan	Keterangan
1.	Penghematan Energy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggantian Bohlam dengan Bohlam LED</li> <li>BPR telah melakukan penghematan listrik dengan cara mematikan semua sarana kerja yang menggunakan arus listrik pada saat sudah selesai kerja atau setelah selesai aktivitas jam kerja.</li> <li>BPR telah mengatur penggunaan kendaraan dinas/operasional secara efisien.</li> </ul>	Kantor Pusat dan Kantor Cabang BPR

## LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT) 2025

2.	Kegiatan Berkelanjutan Internal	Penghematan Kertas dengan penggunaan teknologi informasi	Kantor Pusat dan Kantor Cabang BPR
3.	Kegiatan Kemasyarakatan Berkelanjutan	Melakukan Penghijauan	Di lakukan dilingkungan kantor pusat maupun cabang
4	Kegiatan Berkelanjutan Internal	Mengganti penggunaan gelas plastik dengan tumbler	Di lakukan dilingkungan kantor pusat maupun cabang

### Penggunaan Energi (Air dan Listrik)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Penggunaan Bahan Bakar (Liter)	37.000	36.460	30.267	26.459
b. Penggunaan Listrik (kWh)	38.000	36.993	25.783	23.728
c. Penggunaan Air (m3)	500	450	425	400
d. Penggunaan Kertas (kg)	1.000	900	660	600

### Total Emisi

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Scope 1 (Ton CO2)	-	-	-	-
b. Scope 2 (Ton CO2)	-	-	-	-
c. Scope 3 (Ton CO2)	-	-	-	-
c.1. Financed Emission (Ton CO2)	-	-	-	-
c.2. Non-Financed Emission (Ton CO2)	-	-	-	-
d. Pengurangan Emisi (Ton CO2)	-	-	-	-
Total Emisi Scope 1,2,3 (a + b + c - d)	-	-	-	-
Total Limbah Dibuang (Ton CO2)	-	-	-	-
Kegiatan Pelestarian Keanekaragaman Hayati (Satuan Rupiah)	-	-	-	-

Kantor pusat dan cabang yang dimiliki BPR berada di wilayah perkotaan. Dengan demikian, Perusahaan memastikan bahwa tidak ada wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati. Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan juga belum melakukan identifikasi pada debitur terkait Upaya mereka pada pelestarian keanekaragaman hayati. Meskipun tidak bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup, BPR mendukung kelestarian lingkungan dengan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari pemanasan global.

Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan tidak menerima pengaduan terkait dampak negative lingkungan hidup dari pemangku kepentingan, termasuk tidak adanya informasi terkait tumpahan yang mungkin terjadi pada aktivitas usaha debitur. Perusahaan juga tidak mendapat laporan pengaduan lingkungan yang berasal dari debitur atau nasabah. Dengan demikian, Perusahaan tidak mengeluarkan biaya akibat denda atau ketidakpatuhan pada pelestarian lingkungan hidup.

3. **Ikhtisar Aspek Keberlanjutan Kinerja** Sosial dan Keuangan Inklusi

Komitmen Perusahaan dan Kinerja keuangan Inklusi

Pemerintah memiliki komitmen untuk memperkenalkan dan memberikan edukasi pengelolaan keuangan pada seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan inklusi dan literasi keuangan menjadi kewajiban bagi semua perbankan. BPR akan melakukan kegiatan inklusi dan literasi keuangan secara berkala untuk memberikan edukasi mengenai Lembaga Jasa Keuangan kepada masyarakat.

Perkembangan Laku Pandai

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Jumlah Agen Laku Pandai	-	-	-	-
b. Jumlah Kepemilikan Rekening Tabungan (Basic Saving Account)	-	-	-	-
c. Jumlah Kepemilikan Rekening Kredit yang melalui referal Agen Laku Pandai	-	-	-	-

Kinerja Sosial Terhadap Ketenagakerjaan

Dalam manajemen sumber daya manusia, perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan dan jenjang karir yang sama sesuai dengan kompetensi karyawan, baik Wanita maupun Pria. Kesempatan yang sama berlaku bagi setiap karyawan tanpa memandang latar belakang maupun gender.

BPR memberikan imbal jasa pekerjaan atau remunerasi sesuai dengan beban dan posisi kerja. Pembayaran remunerasi juga merupakan bagian dari nilai ekonomi langsung yang didistribusikan. Pemberian remunerasi tidak membedakan gender. Namun, perbedaan dapat terjadi karena status ketenagakerjaan, jenjang jabatan, prestasi kerja, dan lama kerja. Bentuk remunerasi antara lain gaji pokok, tunjangan, dan insentif lainnya.

Manajemen SDM memperhatikan kualitas dan kompetensi setiap karyawan. Setiap tahunnya, Perusahaan selalu mengusahakan pengadaan pelatihan dan pengembangan kemampuan untuk seluruh karyawan. Perusahaan juga mengirimkan karyawan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga eksternal.

Pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan dilakukan antara lain melalui metode webinar (online), pembelajaran kelas (in class), on the job training (OJT), dan diskusi grup.

Kinerja aspek Sosial Terkait Ketenagakerjaan Internal BPR

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Jumlah Pegawai Bank	85	94	81	72
Jumlah Direksi dan Komisaris (Total Jumlah Pria dan Wanita)	4	4	4	4
Jumlah Direksi dan Komisaris Pria	4	4	4	4
Jumlah Direksi dan Komisaris Wanita				
Jumlah Pegawai Difable	-	-	-	-

Kinerja sosial Terhadap Masyarakat

Pemerintah memiliki komitmen untuk memperkenalkan dan memberikan edukasi pengelolaan keuangan pada seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan inklusi dan literasi keuangan menjadi kewajiban bagi semua perbankan. BPR akan melakukan kegiatan inklusi dan literasi keuangan secara berkala untuk memberikan edukasi mengenai Lembaga Jasa Keuangan kepada masyarakat.

Setiap nasabah yang mendapatkan dampak negatif atas layanan Perusahaan, berhak menyampaikan pengaduan. Di BPR, pengaduan nasabah, termasuk masyarakat, dibedakan menjadi:

1. Masyarakat selaku nasabah yang melaporkan hal-hal seperti pengaduan, dan ketidakpuasan terkait produk dan layanan kredit, dugaan fraud yang dilakukan oleh karyawan, dan lainnya;
2. Masyarakat umum nasabah maupun bukan nasabah, yang melaporkan pengaduan atas kegiatan BPR yang bersinggungan dengan mereka, seperti kegiatan pemasaran produk dan layanan pembiayaan, kegiatan sosial, dan lainnya.

Untuk memberikan respon atas pengaduan yang diterima, Perusahaan memiliki mekanisme dan unit yang menangani pengaduan nasabah. Pengaduan dapat disampaikan melalui email BPR atau Langsung Datang ke Kantor BPR Terdekat. Keberadaan Unit Layanan Pengaduan Konsumen akan terus meningkatkan kualitas dalam menindaklanjuti setiap pengaduan, serta menyelesaikan setiap pengaduan dengan baik, serta memberikan perlindungan kerahasiaan pelapor sesuai ketentuan.

Selain itu kinerja sosial dapat dilihat dari BPR telah memberikan layanan yang setara kepada semua debitur atas produk dan/atau jasa yang dimiliki serta menyampaikan informasi produk dan/atau jasa akurat kepada debitur.

Kinerja Aspek Sosial Terkait Dana Kegiatan Sosial serta Keanggotaan Pada asosiasi

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Realisasi Dana Untuk Kegiatan Sosial (Satuan Rupiah)	30.000.000	28.600.000	16.200.000	20.000.000
Jumlah Keanggotaan pada Asosiasi	1	1	1	1

4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan
- Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan BPR mulai menyesuaikan kebijakan yang mendukung pembiayaan berwawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) untuk memastikan keamanan teknologi layanan pembiayaan, mengembangkan layanan digital untuk meningkatkan efisiensi, serta melakukan kegiatan inklusi dan literasi keuangan. Implementasi ini sejalan dengan dukungan BPR pada pencapaian target Empat Pilar Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Ekonomi, Lingkungan, serta Tata Kelola.

Selain itu, budaya keberlanjutan juga ditegakkan melalui himbauan-himbauan di internal Perusahaan, misalnya untuk melakukan efisiensi listrik dan kertas, meningkatkan kepedulian pada lingkungan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta mengikuti perkembangan inovasi teknologi digital. Manajemen juga mendorong pola pikir dan perilaku karyawan untuk lebih komprehensif memahami aspek Lingkungan Sosial Tata Kelola (LST) dan mampu mengikuti perubahan dunia pembiayaan yang sangat cepat.

Jumlah Persentase Produk dan Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Nasabah

Semua produk dan jasa yang ditawarkan PT. BPR Mindosari telah memenuhi semua persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga telah teruji keamanannya bagi nasabah.

PT. BPR Mindosari juga melakukan kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan secara berkala sehingga calon nasabah atau nasabah mendapatkan pemahaman yang benar tentang produk/jasa yang ditawarkan Perseroan. Dengan demikian, mereka akan melakukan investasi sesuai kebutuhan dan telah mengetahui profil risiko yang melekat di dalam produk/jasa tersebut.

**Dampak Positif dan Negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa keuangan Berkelanjutan**

PT. BPR Mindosari telah melakukan penilaian terhadap setiap produk/ jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan dan mengacu pada Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dalam POJK Keuangan Berkelanjutan, maka PT. BPR Mindosari akan memberikan dana dengan memegang prinsip kehati-hatian, termasuk mencegah risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. Upaya itu membawa hasil dengan tidak adanya dampak negatif atas produk dan jasa yang dikeluarkan PT. BPR Mindosari pada tahun pelaporan.

Jumlah Produk yang Ditarik Kembali dan Alasannya

Tidak ada produk yang ditarik atas pertimbangan internal PT. BPR Mindosari maupun perintah dari regulator (OJK).

C. PROFIL SINGKAT BPR

Informasi Umum BPR

Sandi	Nama	Status	Alamat	No. Telpon	No. Fac	E-mail	Web
60193901	PT.BPR.Mindosari	Pusat	Jl. Santoso No.143 Kepahiangan	0732-392400	0732-392400	mindosari@yahoo.com	<a href="https://:bankmindosari.co.id">https://:bankmindosari.co.id</a>
60193902	PT.BPR.Mindosari Cabang Arga Makmur	Cabang	Jl. Flamboyan Desa Giri Kencana Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu	0737-5281850		mindosaricabketahun@gmail.com	
60193903	PT.BPR.Mindosari Cabang Seluma	Cabang	Jl. Merdeka Kelurahan Lubuk Lintang Kec. Seluma Kab. Seluma Prov. Bengkulu	0736-7393082		mindosariseluma@gmail.com	
60193904	PT.BPR.Mindosari Cabang Mukomuko	Cabang	Jl. Lintas Bengkulu – Padang Desa Penarik Kec. Penarik Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu	0737-5271493		mindosaricabmukomuko@gmail.com	
60193905	PT.BPR.Mindosari Cabang Kaur	Cabang	Jl. Lintas Lintas Barat Sumatera Desa Tanjung Besar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Prov. Bengkulu	0737-2030010		mindosaricabangkaur@gmail.com	
	PT. BPR Mindosari Kantor Kas	Kantor Kas	Jl. Basuki Rahmat RT.001 Kel. Gunung Alam Kec. Kota Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara			kantorkasmindosariarma@gmail.com	

1. Skala Usaha BPR

a. Total Aset dan Total Kewajiban

No.	Pos Keuangan	31 Des 2025
1	Total Aset	74.910.496.172
2	Total Kewajiban	57.595.235.350
3	Total Ekuitas	17.315.260.822

b. Jumlah Karyawan

Sepanjang Tahun 2025 PT. BPR Mindosari memiliki SDM sebanyak 98 Personal yang terdiri dari Pengurus dan Pegawai dengan besaran gaji minimal sesuai upah minimum daerah. Demografi ketenagakerjaan terdapat pada lampiran Laporan.

c. Persentase kepemilikan Saham

Susunan Pemegang Saham BPR posisi 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

No	Nama Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham %
1	LUCERIA SIAGIAN	89,67
2	SABAR GANDA LEONARDO SITORUS	2,60
3	ADUMAHATI R.M SITORUS	2.42
4	SIHAR P.H SITORUS	1.77
5	HAKIM AGUNG S. SITORUS	1.77
6	IKA ROHANI TIURLARA SITORUS	1.77
Total		100

2. Wilayah Operasional

Jangkauan operasional BPR Mindosari tersebar di berbagai beberapa wilayah Kabupaten Provinsi Bengkulu. Hingga akhir Desember 2025, BPR memiliki 1 Kantor Pusat, 4 Kantor Cabang dan 1 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur. Hingga saat ini, BPR telah melayani pasar regional dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Adapun jenis debitur yang menggunakan produk layanan BPR meliputi debitur perorangan.

3. Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha BPR

No.	Produk Yang Memenuhi Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan
1	Penghimpunan Dana
	a. Tabunganku
	b. Tabungan Danasari
	c. Deposito Berjangka

No.	Produk Yang Memenuhi Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan
2	Penyaluran Dana
	a. Kredit UMKM
	b. Kredit Lain yang Memenuhi Kriteria kegiatan Usaha Berkelanjutan

**Profil Singkat dan Nilai Keberlanjutan Bank**

1. Visi dan Misi Keberlanjutan

a. Visi Berkelanjutan

Menjadi salah satu BPR yang handal dan di percaya dalam memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat

b. Misi Berkelanjutan

- Mewujudkan BPR yang bertumbuh dan berkembang,
- Memberikan kontribusi yang baik kepada pesaham, kesegenap karyawan, rekan kerja dan nasabah.
- Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

c. Keanggotaan Pada Asosiasi

Terlibat dalam asosiasi guna mendapatkan informasi terkini terkait pengembangan industri pembiayaan dan hal-hal yang mempengaruhinya, perkembangan dunia usaha, serta risiko dan peluangnya. BPR terlibat keanggotaan pada asosiasi :

No	Asosiasi	Peran	Tmt Keanggotaan
1	Perbarindo	Anggota	

d. Perubahan yang bersifat signifikan

- Tidak terdapat penutupan atau pembukaan Kantor Cabang
- Tidak terdapat perubahan struktur kepemilikan BPR
- Terdapat pembukaan 1 (satu) Kantor Kas pada Tahun 2025

**D. PENJELASAN DIREKSI**

1. Penjelasan Umum

a) Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

i) Penjelasan Nilai Keberlanjutan Bagi BPR

Laporan keberlanjutan berisi kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berbasis pada prinsip Keuangan Berkelanjutan. Implementasi ini sejalan dengan respon Perusahaan dalam menyikapi perkembangan ekonomi global dan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. POJK No.51/ POJK.03/2017 tentang Implementasi Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Melalui laporan ini, Direksi BPR juga mengungkapkan dukungan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). POJK No.51/ POJK.03/2017, menjadi pedoman bagi lembaga jasa keuangan dalam melakukan

kegiatan usahanya dengan selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Perusahaan (ekonomi), sosial dan lingkungan hidup.

- ii) Penjelasan Respon BPR Terhadap Isu Terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan  
Mengikuti dinamika bisnis yang semakin kompleks, Direksi BPR menyusun strategi keberlanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan. Selain memusatkan perhatian pada pencapaian target bisnis dan operasional, Perusahaan juga berupaya mengikuti arahan strategi keberlanjutan dan menyalurkan pembiayaan terhadap produk-produk ramah lingkungan. Dalam kegiatan sehari-hari, Perusahaan berusaha menerapkan kebiasaan-kebiasaan ramah lingkungan khususnya terkait dengan kegiatan hemat energi dan penghematan penggunaan kertas. Melalui laporan ini, Direksi menyampaikan kinerja keberlanjutan Perusahaan dan komitmen yang kami jalankan dalam mengimplementasikan program-program keberlanjutan.
- iii) Penjelasan komitmen pimpinan BPR dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan  
Penyesuaian untuk mendukung implementasi Keuangan Berkelanjutan telah dilaksanakan sejak dibuatnya RAKB pada 2025. Sepanjang implementasi hingga tahun 2025, Perusahaan menitikberatkan pada penyesuaian kebijakan, dan melaksanakan pelatihan internal. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan ini adalah kesadaran untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang sejalan dengan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan. Selain itu, penyesuaian kebijakan dan pemetaan kegiatan pembiayaan juga memerlukan kerja sama antar unit kerja sehingga diperlukan koordinasi yang terus-menerus. Direksi berkomitmen menerapkan Keuangan Berkelanjutan, melaksanakan RAKB, serta mendukung pembangunan keberlanjutan melalui pembiayaan kepada para debitur. Direksi menyadari bahwa tantangan pencapaian Keuangan Berkelanjutan ini masih perlu dikelola dengan baik. Untuk itu, Direksi BPR mengajak segenap karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama membangun budaya keberlanjutan demi mencapai hasil yang optimal untuk tahun-tahun mendatang.
- iv) Pencapaian Kinerja Penerapan Keuangan Berkelanjutan  
Pencapaian kinerja Keuangan Berkelanjutan yang disajikan dalam laporan ini mengandung tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

b) Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Sebagai upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), BPR menetapkan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) dengan rencana 5 (lima) tahun sebagai Rencana Aksi dalam Jangka Panjang. Selain itu, Bank juga memiliki Rencana Aksi dalam Jangka Pendek (satu tahun) yang ditetapkan di tahun 2025.

Target yang ditetapkan oleh Bank yaitu pegawai telah mengikuti sosialisasi Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan menerapkan operasional Perbankan Hijau (*green banking*).

Laporan Keberlanjutan ini berisi komitmen, strategi dan kinerja pencapaian kami terkait Keuangan Berkelanjutan. Adapun komitmen kami adalah:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha terutama dalam pemberian kredit.
2. Menjalankan operasional Bank yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
3. Pengembangan kompetensi staf pada pemahaman terhadap sosial dan lingkungan hidup serta penerapannya dalam setiap kegiatan usaha Bank.
4. Menerapkan perbankan yang inklusif dengan menyediakan dukungan akses keuangan bagi segenap masyarakat .
5. Berpartisipasi dalam upaya bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c) Strategi Pencapaian Target

i) Pengelolaan Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Terkait Aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan merupakan bagian dari risiko bisnis, dalam pelaksanaan pengawasan dibawah Direksi yang Membawahi Fungsi Kepatuhan terutama Bagian Manajemen Risiko. Pengelolaan risiko ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi untuk mencapai target kinerja Perusahaan

Strategi pengembangan bisnis kedepan terkait dengan penerapan keuangan berkelanjutan, BPR akan melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

- a. Perusahaan berupaya mencari mitra strategis yang peduli dan ramah kepada lingkungan dan sosial serta peduli kepada kelestarian lingkungan hidup.
- b. Perusahaan terus menjaga reputasi terhadap pihak antara lain; pemerintah sebagai regulator, para pemegang saham sebagai pendana dan masyarakat, hal ini dilakukan sebagai wujud aktifitas Perusahaan agar tidak berdampak sosial.
- c. Memakai dan menggunakan infra struktur yang ramah lingkungan

ii) Pemanfaatan Peluang Dan Prospek Usaha

Peluang dan prospek usaha BPR antara lain berupa dukungan pemerintah kepada BPR untuk membiayai Kategori Kredit Usaha Berkelanjutan/KKUB sesuai dengan Pedoman Teknis POJK No. 51/POJK.03/2017 dan membuka akses keuangan

inklusif. Perubahan bisnis yang terjadi dari yang sudah berjalan saat ini menjadi bisnis yang peduli lingkungan juga menjadi salah satu peluang bagi pemberian pembiayaan berwawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST). Selain itu, dalam hal teknologi, besarnya peluang untuk menerapkan proses digital dapat membantu meningkatkan keunggulan bersaing Perusahaan

### iii) Penjelasan Situasi Eksternal Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan Hidup Yang Berpotensi Mempengaruhi Keberlanjutan BPR

Tahun 2025 merupakan tahun dengan dinamika yang cukup kompleks dan percepatan ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun seiring dengan hal tersebut, terdapat juga tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi dan dilewati oleh BPR. Menyadari hal ini, BPR tetap berusaha menjalankan komitmen untuk mengimplementasikan strategi berkelanjutan yang sudah disiapkan. Pemberlakuan Cadangan Kerugian Penyisihan Nilai (CKPN) merupakan tantangan baru bagi BPR untuk lebih baik dalam pemeliharaan kualitas kredit dan BPR harus menyesuaikan strategi dengan perkembangan kondisi dan memaksimalkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaannya.

## 2. Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi

BPR memperketat pengawasan terhadap kebijakan pemberian kredit dengan memperhatikan dampak negatif risiko yang ditimbulkannya, terutama pada kelestarian lingkungan. Perusahaan mendukung para debitur untuk memiliki sertifikasi lingkungan, maupun sertifikasi bangunan berwawasan lingkungan, untuk mewujudkan hal tersebut tentu BPR memiliki berbagai macam tantangan yang bersumber dari beberapa ruang lingkup operasional BPR.

### a) Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi dari Sisi Internal

#### 1. Fokus Bisnis Bank

Kendala dalam implementasi keuangan berkelanjutan pada PT. BPR Mindosari seringkali berhubungan dengan kemampuan internal organisasi untuk beradaptasi dari fokus laba instan menjadi perkembangan yang menyeluruh, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

#### 2. Operasional Bank

Dilihat dari sudut pandang operasional PT. BPR Mindosari, kesulitan utama dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan terletak pada bagaimana prinsip-prinsip ESG (*Environmental, Social and Governance*) atau LST (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola) diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses pemberian kredit, pelayanan kepada nasabah, hingga penyusunan laporan. Masih terdapat perbedaan antara kebijakan yang tertulis dan implementasinya di lapangan.

3. Kebijakan Internal

PT. BPR Mindosari belum sepenuhnya memiliki pedoman internal yang secara jelas dan komprehensif untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam Kebijakan dan Prosedur Pemberian Kredit, Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko, maupun Kebijakan Penerapan Tata kelola.

3. Keahlian SDM BPR

BPR menyadari masih terdapat tantangan dari segi SDM, salah satunya yaitu belum terdapat SDM khusus yang bertugas khusus ESG atau Sustainability Officer, dimana biasanya fungsi ini biasanya dirangkap oleh bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang juga memiliki beban kerja besar dan perangkapan jabatan. Belum terdapat SDM yang ahli untuk menilai kepatuhan usaha terhadap regulasi lingkungan hidup.

4. Lainnya

Tantangan lainnya yang tidak kalah beratnya adalah profil dan kesiapan debitur. Mayoritas nasabah BPR berasal dari segmen mikro dan kecil yang umumnya belum memiliki kesadaran atau kemampuan untuk menerapkan praktik usaha ramah lingkungan. Banyak usaha masih informal, sehingga sulit menyediakan dokumen legalitas, izin lingkungan, atau bukti pengelolaan limbah.

Upaya Yang dilakukan BPR

PT. BPR Mindosari menyadari bahwa penerapan keuangan berkelanjutan bukan sekedar memenuhi POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan, tetapi bagaimana membuat prinsip tersebut realistis dijalankan dengan kapasitas Bank yang relatif terbatas.

Karena itu, upaya yang dicoba dilakukan oleh dilakukan bersifat bertahap, praktis, dan menyesuaikan profil nasabah UMKM. Langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen manajemen Direksi dan Dewan Komisaris menetapkan arah strategis melalui kebijakan, rencana aksi, serta penyediaan sumber daya. Tindakan dan perilaku etis dari para petinggi perusahaan penting agar seluruh unit memahami bahwa keberlanjutan adalah bagian dari strategi bisnis, bukan sekedar proyek tambahan
2. Penyusunan kebijakan dan prosedur yang sederhana BPR menerjemahkan prinsip ESG ke dalam panduan praktis, misalnya daftar sektor yang dibatasi, klasifikasi risiko rendah–tinggi, serta *checklist* singkat bagi account officer. Pendekatan ini membuat implementasi lebih mudah diterapkan.

3. Peningkatan kapasitas SDM Dilakukan melalui pelatihan rutin, workshop studi kasus UMKM, serta pembekalan cara identifikasi risiko lingkungan dan sosial yang relevan dengan kondisi lapangan.
4. Integrasi ke proses kredit Aspek keberlanjutan mulai dimasukkan dalam tahap analisis, persetujuan, hingga monitoring. Tidak harus rumit, tetapi cukup memastikan adanya pertimbangan dampak lingkungan dan sosial.
6. Peningkatan kualitas data dan pelaporan Walaupun sistem IT terbatas, BPR dapat memulai dengan *template* manual atau penandaan portofolio untuk memudahkan kompilasi data secara bertahap.
7. Edukasi dan pendampingan nasabah Karena banyak debitur belum memahami isu keberlanjutan, bank dapat memberikan sosialisasi ringan mengenai manfaat praktik usaha yang lebih bertanggung jawab.
8. Implementasi bertahap berbasis prioritas Implementasi Keuangan Berkelanjutan pada PT. BPR MINDOSARI tidak harus langsung sempurna. Fokus dapat dimulai dari sektor dengan risiko tinggi atau peluang hijau yang paling memungkinkan di wilayah kerja.

### b) Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi dari Sisi Eksternal

#### 1. Kebijakan Pemerintah

Dari sisi eksternal, khususnya yang bersumber dari kebijakan dan lingkungan regulasi pemerintah dan regulator, PT. BPR Mindosari sering menghadapi dinamika yang tidak sederhana dalam menerapkan keuangan berkelanjutan. Walaupun arah kebijakan nasional mendorong praktik ESG, penerjemahannya pada bank berskala kecil seperti BPR membutuhkan penyesuaian yang cukup besar.

Beberapa tantangan yang umum dirasakan antara lain berikut.

- i) Perubahan dan perkembangan regulasi yang cepat. Ketentuan mengenai keuangan berkelanjutan, pelaporan, maupun klasifikasi kegiatan hijau terus berkembang. BPR perlu waktu untuk memahami, menafsirkan, dan menyesuaikan proses internalnya.
- ii) Kebutuhan pelaporan yang semakin detail. Permintaan data portofolio berkelanjutan sering memerlukan pemetaan sektor dan informasi debitur yang belum tentu tersedia. Bagi BPR dengan infrastruktur terbatas, ini menjadi beban tambahan.
- iii) Standar yang cenderung mengacu pada praktik bank umum. Sebagian pedoman dirancang dengan asumsi kapasitas bank besar, sehingga implementasinya pada BPR memerlukan penyederhanaan atau interpretasi khusus

### 2. Perekonomian Nasional, Regional, dan Global

Secara garis Besar PT. BPR Mindosari menghadapi tantangan secara eksternal dan jika dipetakan menjadi hal-hal sebagai berikut sesuai pada gambaran pada masing-masing level di bawah ini.

#### Tingkat Nasional

Di tingkat nasional, isu utama biasanya berkaitan dengan struktur ekonomi dan kesiapan pelaku usaha.

Pertama, ketergantungan pada sektor tertentu yang belum sepenuhnya ramah lingkungan. Peralihan menuju praktik yang lebih hijau membutuhkan biaya dan waktu, sehingga permintaan pembiayaan berkelanjutan belum tumbuh cepat.

Kedua, kesenjangan literasi dan kapasitas UMKM. Sebagian besar pelaku usaha masih fokus pada keberlangsungan bisnis jangka pendek sehingga investasi pada teknologi atau proses yang lebih berkelanjutan belum menjadi prioritas.

#### Tingkat Regional (daerah/wilayah)

Pada level regional, variasi kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur sangat memengaruhi.

Banyak daerah menghadapi keterbatasan akses teknologi hijau, minimnya konsultan atau lembaga pendukung, serta belum berkembangnya rantai pasok yang berkelanjutan.

Selain itu, prioritas pembangunan daerah sering masih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja cepat, sehingga aspek lingkungan belum selalu menjadi pertimbangan utama.

Kualitas data dan pengawasan lingkungan antar daerah juga bisa berbeda, menyulitkan lembaga keuangan untuk melakukan penilaian yang seragam.

#### Tingkat Global

Di tingkat global, tekanan datang dari perubahan standar, pasar, dan risiko lintas negara.

Ada peningkatan tuntutan terhadap transparansi dan standar ESG internasional, yang terus berkembang dan memerlukan penyesuaian.

Fluktuasi ekonomi dunia, perubahan harga komoditas, dan risiko perubahan iklim menimbulkan ketidakpastian investasi.

Selain itu, muncul risiko akses pendanaan internasional yang semakin mensyaratkan kepatuhan pada prinsip keberlanjutan tertentu.

Secara keseluruhan, tantangan pada tiga level ini saling terkait. Kondisi global memengaruhi kebijakan nasional, lalu diterjemahkan secara berbeda di tiap daerah. Lembaga keuangan, termasuk BPR, berada di tengah dinamika tersebut.

### 3. Lainnya

Ciri khas dan kematangan nasabah. Sebagian besar debitur BPR datang dari kalangan usaha mikro dan kecil yang pemahaman lingkungannya masih terbatas. Banyak bisnis yang belum berizin, belum memiliki standar pengelolaan limbah, atau praktik kerja yang terdokumentasi dengan baik. Hal ini menyulitkan bank dalam mengumpulkan informasi untuk mengevaluasi aspek keberlanjutan.

Pandangan dan penolakan dari pihak peminjam. Persyaratan tambahan atau pertanyaan terkait pengaruh terhadap lingkungan dapat dianggap sebagai penghalang dalam mendapatkan pinjaman. Apabila tidak diatasi dengan tepat, hal ini berpotensi mengurangi ketertarikan calon debitur.

#### Upaya Yang Dilakukan BPR

Untuk menghadapi tantangan eksternal dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan, PT. BPR Mindosari menempuh langkah seperti meningkatkan komunikasi dengan regulator, mengikuti forum industri/perbarindo, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dengan pendekatan yang paling realistis sesuai kapasitas.

Berikut beberapa upaya yang lazim ditempuh oleh PT. BPR MINDOSARI antara lain:

1. Edukasi dan literasi kepada nasabah. BPR dapat melakukan sosialisasi sederhana mengenai praktik usaha yang lebih aman bagi lingkungan, manfaat legalitas, serta potensi efisiensi biaya. Pendekatan persuasif ini membantu mengurangi resistensi ketika bank mulai menanyakan aspek ESG.
2. Mengembangkan produk yang realistis dengan pasar. Daripada menunggu proyek hijau besar, BPR dapat mendorong pembiayaan yang berdampak sederhana namun nyata, seperti pembiayaan terhadap Kegiatan UMKM, efisiensi energi, pertanian ramah lingkungan, atau pengurangan limbah.
3. Peningkatan komunikasi dengan regulator. Melalui forum industri atau asosiasi, BPR dapat memperoleh klarifikasi, berbagi praktik baik, serta menyampaikan kendala lapangan sehingga implementasi lebih sesuai dengan kapasitas.
4. Penyederhanaan persyaratan. Agar tidak menghambat minat debitur, bank dapat menggunakan checklist atau klasifikasi risiko yang proporsional terhadap skala usaha.
5. Penguatan reputasi dan komunikasi publik. Dengan menunjukkan komitmen pada pembiayaan yang bertanggung jawab, bank dapat membangun kepercayaan masyarakat dan menarik nasabah yang sejalan.

E. TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

1. Struktur Tata Kelola Keberlanjutan

Dalam menerapkan GCG, Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar tata kelola, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran dengan rincian :

Prinsip Dasar	Uraian	Penerapan Di Lingkup Perusahaan
Transparansi	Perseroan berkomitmen untuk memberikan informasi secara jelas, terbuka, dan akurat untuk para pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi yang transparan dilakukan oleh Perseroan dengan tetap mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan dan penjelasan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025</li> <li>- Penerbitan Laporan Tahunan 2025</li> <li>- Penerbitan Laporan Keberlanjutan 2025</li> <li>- Penerbitan Laporan Keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan tahunan, triwulan dan bulanan</li> <li>- Penerbitan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola 2025</li> </ul>
Akuntabilitas	Perseroan menerapkan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban, sehingga pengelolaan bisnis dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen senantiasa membuat job descriptions yang jelas kepada semua pegawai dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dengan demikian, seluruh organ Perseroan memiliki kejelasan hak dan kewajiban, fungsi dan tanggung jawab, serta kewenangannya dalam setiap kebijakan Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembagian tugas yang jelas antar organ Perseroan, termasuk dengan merinci tugas dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi</li> <li>- Menerapkan check and balance system.</li> <li>- Memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang disepakati, konsisten dengan nilai-nilai Perseroan (corporate core values), sasaran usaha, dan strategi Perseroan</li> <li>- Memiliki sistem reward dan punishment.</li> </ul>
Pertanggung jawaban	Pertanggungjawaban diwujudkan dengan dipenuhinya kewajiban Perseroan dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku yang terkait dengan bidang usahanya, antara lain ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kewajiban perpajakan, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta persaingan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>- Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu</li> <li>- Melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility)</li> <li>- Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang berlaku</li> </ul>

Prinsip Dasar	Uraian	Penerapan Di Lingkup Perusahaan
Independensi	Kemandirian atau independensi adalah sebuah keadaan di mana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam pelaksanaannya, kemandirian atau independensi dapat diwujudkan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang masing-masing organ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab di antara organ Perseroan</li> <li>- Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap pengurusan Perseroan</li> <li>- Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan dengan menandatangani pakta integritas.</li> <li>- Penerapan kebijakan dan sistem yang meminimalkan terjadinya benturan kepentingan.</li> </ul>
Kewajaran	Kewajaran diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan Perseroan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dengan memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan kinerjanya tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin	Kewajaran diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan Perseroan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dengan memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan kinerjanya tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin

Uraian Mengenai Tugas Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris, Pegawai, Pejabat Dan/Atau Unit Kerja Yang Menjadi Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan,

Satuan Kerja	Tugas & Tanggung Jawab
Dewan Komisaris	Mengawasi Kebijakan Direksi Dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan
Direksi	Pengarah/Pengambil Keputusan/Kebijakan Penerapan Keuangan Berkelanjutan
Unit Kerja Manajemen Risiko	Melakukan penyesuaian analisis manajemen risiko Keuangan Berkelanjutan sesuai ketentuan Regulator
Unit Kerja Pemasaran	Merencanakan peningkatan portfolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan
Unit Kerja SDM	Menyusun agenda pengembangan kapasitas SDM mengenai Keuangan Berkelanjutan
Unit Kerja Operasional	Menyusun Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)

## 2. Struktur Organisasi dan Pengendalian Internal

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah Unit Kerja yang menangani Keuangan Berkelanjutan dan Pengendalian Risiko Iklim	2	2	2
Jumlah SPO Manajemen Risiko terkait Keuangan Berkelanjutan	1	1	1

## 3. Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Dewan Komisaris	1	5	1
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Direksi	6	5	1
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Pejabat Eksekutif	11	9	7
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Pegawai	3	1	1

Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan

- Salah satu langkah strategis untuk pengembangan kompetensi internal Bank dalam menunjang kegiatan keuangan berkelanjutan adalah dengan membuat pelatihan Keuangan Berkelanjutan. ini menjadi salah satu sarana pengembangan kompetensi Keuangan Berkelanjutan pada pekerja Bank.

#### 4. Identifikasi Risiko Penerapan Keuangan Berkelanjutan

**Prosedur BPR dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko** atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan **telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko BPR.**

- Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, terdapat risiko-risiko yang muncul seiring dengan pelaksanaannya. Risiko yang teridentifikasi, salah satunya adalah penyesuaian syarat pengajuan kredit untuk meningkatkan portofolio hijau. BPR berusaha menerapkan manajemen risiko lingkungan, sosial, & tata kelola (LST) dalam proses penilaian kelayakan kredit usaha yang diberikan.
- Implementasi manajemen risiko lingkungan, sosial, & tata kelola (LST), antara lain:
  - a. Melakukan verifikasi debitur yang masuk dalam kategori konstruksi berwawasan hijau antara lain:
    - Bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam secara efektif, efisien, dan bijaksana
    - Bidang usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja;
    - Bidang usaha yang mampu meminimalkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
  - b. BPR telah melaksanakan tindakan terhadap debitur yang belum melengkapi izin lingkungan, antara lain:
    - Menyusun kebijakan untuk mensyaratkan kepada calon debitur baru yang berwawasan lingkungan, sosial dan tata kelola (LST), antara lain dengan memberikan nilai rating lebih tinggi dibandingkan dengan calon debitur yang belum berwawasan lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) dalam penilaian debitur.
    - Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi turut mengawasi jalannya penerapan Keuangan Berkelanjutan. Cakupan pengawasan terdiri dari pengendalian risiko, pelaksanaan, kebijakan, dan perkembangan Keuangan Berkelanjutan. Secara langsung, Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan juga mengawasi penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), penyesuaian kebijakan kredit, visi dan misi keberlanjutan, serta penyusunan laporan keberlanjutan.

#### 5. Penjelasan terkait **Pemangku kepentingan**

Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang berhubungan dan berpengaruh pada kegiatan usaha dan keberlanjutan Perusahaan secara signifikan. Interaksi yang terbangun antara BPR dan pemangku kepentingan dapat melalui berbagai aktivitas, keperluan, dan unit bisnis terkait.

Manajemen melakukan pemetaan pemangku kepentingan melalui tingkat kedekatan dan tingkat kepentingan. Secara internal, pendekatan dengan pemangku kepentingan dibangun melalui dialog pada berbagai saluran komunikasi dan rapat. Secara eksternal, pendekatan dilakukan melalui, pertemuan bisnis, atau sosialisasi/seminar

Perusahaan melakukan pendekatan terhadap pemangku kepentingan melalui hubungan profesional, untuk mendapatkan masukan dan saran guna meningkatkan pelayanan. Selain itu, pendekatan pada pemangku kepentingan juga diharapkan bisa menggali informasi dan meningkatkan pemahaman Perusahaan terhadap kebutuhan mereka, termasuk pengelolaan kinerja keberlanjutan.

a. Pemegang Saham

Bagi pemegang saham, keterlibatan ini krusial karena menghubungkan kinerja keberlanjutan (ESG - *Environmental, Social, Governance*) dengan nilai finansial jangka panjang, kepercayaan investor, dan manajemen risiko.

b. Pemerintah

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam laporan keberlanjutan bagi pemerintah (daerah maupun pusat) bukan hanya tentang pengungkapan data, melainkan proses dialog dua arah untuk memahami ekspektasi dan dampak kegiatan pemerintah terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi.

c. Otoritas

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) merupakan elemen krusial dalam laporan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik. OJK mewajibkan entitas tersebut mengungkapkan pendekatan dan hasil keterlibatan pemangku kepentingan dalam laporan keberlanjutan mereka.

d. Akademisi

Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*) dalam laporan keuangan berkelanjutan adalah proses komunikasi dan dialog antara organisasi dengan pihak-pihak yang terdampak oleh operasional perusahaan. Bagi Akademisi, pelibatan ini penting untuk meningkatkan kredibilitas laporan, memastikan transparansi, dan menyelaraskan harapan generasi muda dengan praktik keberlanjutan perusahaan.

e. Praktisi

Bagi praktisi, laporan keberlanjutan bukan sekadar kepatuhan regulasi, melainkan alat komunikasi strategis untuk membangun kepercayaan dan transparansi, khususnya sesuai dengan POJK No. 51/2017 di Indonesia.

f. Pegawai

Bagi Pegawai, keterlibatan dalam laporan berkelanjutan yaitu tekanan dari pegawai terkait budaya perusahaan dan komitmen ESG.

g. Nasabah

Keterlibatan nasabah dalam laporan keuangan berkelanjutan (*sustainability report*) merupakan komponen penting bagi lembaga jasa keuangan (terutama bank) di Indonesia, sebagaimana diatur dalam POJK 51/POJK.03/2017 mengenai Keuangan Berkelanjutan. Nasabah dipandang tidak hanya sebagai pengguna jasa, tetapi sebagai pemangku kepentingan utama yang terdampak

oleh aktivitas pembiayaan bank dan memiliki peran dalam ekosistem keuangan berkelanjutan.

h. Lainnya

Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*) adalah komponen krusial dalam laporan keuangan berkelanjutan (*sustainability report*) yang berfungsi untuk mengidentifikasi, memahami, dan merespons isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang material bagi perusahaan. Berdasarkan POJK 51, perusahaan diwajibkan menjelaskan bagaimana mereka melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan keuangan berkelanjutan.

F. VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN

Belum terdapat Verifikasi Tertulis Dari Pihak Independen terkait Laporan Keberlanjutan BPR Posisi 31 Desember 2025

G. LEMBAR UMPAN BALIK (FEEDBACK) UNTUK PEMBACA

Untuk terwujudnya komunikasi dua arah sekaligus penerapan evaluasi PT. BPR Mindosari yang bertujuan meningkatkan kualitas Laporan di masa mendatang, PT. BPR Mindosari menyediakan Lembaran Umpan Balik di bagian akhir Laporan Keberlanjutan ini. Dengan lembaran tersebut, diharapkan pembaca dan pengguna laporan ini dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan.

H. TANGGAPAN LJK, EMITEN, ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA

Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 Milyar penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 ini merupakan yang kedua kalinya oleh karena itu belum mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan. Bank akan terus melakukan perbaikan agar dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi segenap pembaca.

Demikian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Tahun 2025 sesuai Lampiran II POJK Nomor 51/POJK.03/2017 kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepahiang, 22 April 2026

PT. BPR Mindosari

Mengetahui,  
Dewan komisaris

Direksi

  
Baginda Oloan Tarigan  
Komisaris Utama

  
Joko Susilo  
Komisaris

  
Mardj Sagala, SE  
Direktur Utama

  
Bajongga Gerswin Marbun, SE  
Direktur Operasional  
Yang Merangkap Fungsi Kepatuhan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEBERLANJUTAN PT. BPR MINDOSARI  
TAHUN 2025**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 telah disusun sesuai dengan POJK Bo. 51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepahiang, 22 April 2026  
PT. BPR Mindosari

Mengetahui,

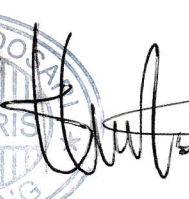
**Dewan komisaris**

**Direksi**



**Baginda Oloan Tarigan**

Komisaris Utama



**Joko Susilo**

Komisaris



**Mardi Sagala, SE**

Direktur Utama



**Bajongga Gerswin Marbun, SE**

Direktur Operasional YMFK

## DEMOGRAFI KETENAGAKERJAAN

### 1. Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	31 Des 2025	Persentase
1	Laki-laki	74	75,51 %
2	Perempuan	24	24,49 %
	Total	98	100 %

### 2. Jumlah Karyawan Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	31 Des 2025	2024	2023
1	Dewan Komisaris	2	2	2
2	Direksi	2	2	2
3	Pejabat Eksekutif	8	8	8
4	Pegawai Staf/Pelaksana	86	73	64
7	Pegawai Dasar	-	-	-
	Total	98	85	76



## Profil Anda

Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Institusi/Perusahaan : .....  
Kontak (telepon,e-mail) : .....

## Kategori pemangku Kepentingan

- Pemerintah  LSM  
 Media  Mitra Usaha  
 Nasabah  Masyarakat  
 Karyawan  Lain-lain

Saran dan tanggapan yang Anda berikan atas informasi yang disajikan dalam laporan ini mohon dikirim ke :

PT. BPR Mindosari  
Jl. Santoso No. 143 A Kepahiang  
Telp : 0732 392400  
HP : 08117321643  
Email : [Mindosari@yahoo.com](mailto:Mindosari@yahoo.com) / [bpr@bankmindosari.co.id](mailto:bpr@bankmindosari.co.id)  
Website : [bankmindosari.co.id](http://bankmindosari.co.id)